Jurnal Acitya Ardana
Volume 4, No. 2, (p.120-137)
e-ISSN: 2807-291X

Analisis Daya Saing Ekonomi Sektoral Kota Depok: Kajian *Location Quotient*, *Dynamic Location Quotient* , dan *Shift Share* untuk Optimalisasi Pajak Daerah

Rheza Auliya Rahman[1]*, Ananda Syakira[2], Azizah Azmi Astari[3], Putri Salsabila Arza[4]
[1234]Politeknik Keuangan Negara STAN1234
[1*]4121210147_rheza@pknstan.ac.id

*penulis korespondensi

Keywords: *GRDP, LQ, DLQ, Shift Share, Leading Sectors, Regional Taxes*

ABSTRACT

This study aims to identify the sectors that serve as the basis of economic competitiveness in Depok City, West Java Province. The analysis is conducted using a descriptive quantitative approach through the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share analysis methods, with data sourced from the Central Bureau of Statistics. The LQ and DLQ results provide information regarding the leading sectors in quadrant 1, while the Shift Share analysis reveals rapidly growing and competitive sectors. The combined findings indicate that the construction and financial services sectors could become top priorities for the government to maximize tax revenue potential in Depok City

Kata Kunci: PDRB, LQ, DLQ, *Shift Share*, Sektor Unggulan, Pajak Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi basis daya saing ekonomi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Analisis dilakukan secara kuantitatif deskriptif menggunakan metode *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)* dan analisis *Shift Share* dengan perolehan data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017–2021. Hasil penelitian LQ dan DLQ memberikan informasi terkait sektor-sektor unggulan pada kuadran 1 serta sektor-sektor dengan pertumbuhan cepat dan berdaya saing pada hasil analisis *Shift Share*. Kombinasi hasil tersebut menunjukan sektor konstruksi dan jasa keuangan dapat menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak di Kota Depok.

How to cite: Rahman, Rheza Auliya., Syakira, Ananda., Astari, Azizah Azmi., Arza, Putri Salsabila. (2024). Analisis Daya Saing Ekonomi Sektoral Kota Depok: Kajian Location Quotient, Dynamic Location Quotient , dan Shift Share untuk Optimalisasi Pajak Daerah. Jurnal Acitya Ardana, 4(2), 120-137.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PENDAHULUAN

Salah satu cara paling umum untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional, adalah pertumbuhan ekonomi. (Fretes, 2017; Pribadi & Nurbiyanto, 2021; Fitria dkk., 2022). Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2000).

Menurut prinsip desentralisasi fiskal dan ekonomi, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola ekonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pribadi & Nurbianto (2021) mengatakan bahwa pemerintah daerah harus menilai kondisi ekonomi di daerah mereka untuk dapat membuat kebijakan yang tepat untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial.

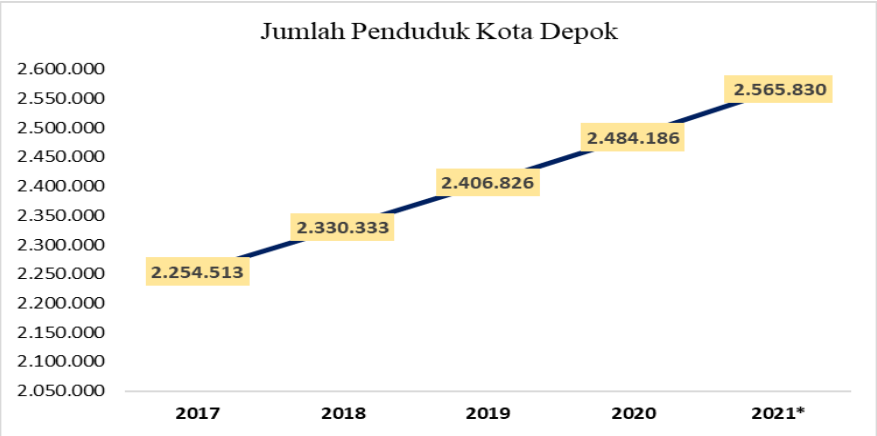

**Angka proyeksi*

Gambar 1. Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2017–2021*
Sumber: Diolah dari BPS Kota Depok (2024)

Dengan lokasinya di wilayah Jabodetabek dan bersebelahan dengan kota metropolitan seperti Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor, dan Bekasi, Kota Depok memiliki potensi sosial ekonomi yang tinggi (Pemkot Depok, 2024). Hal kemudian sejalan dengan meningkatnya penduduk kota depok dalam periode 2017 hingga 2021 memiliki rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,28% per tahun.

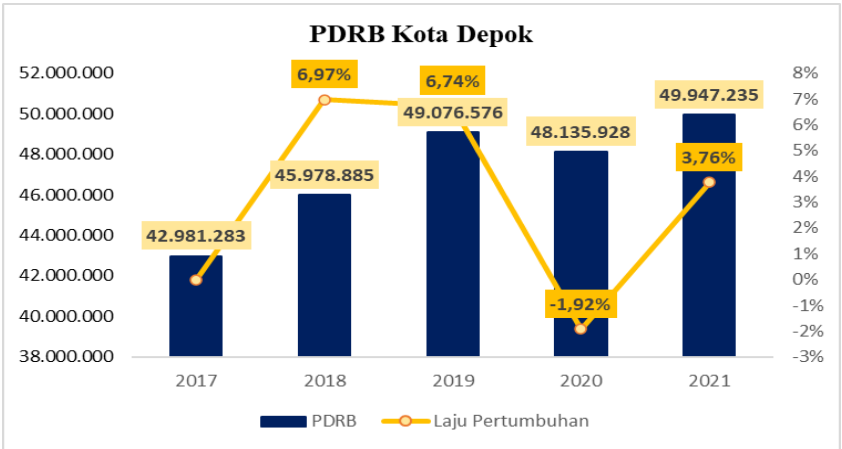

Sumber: Diolah dari BPS Kota Depok (2024)
Gambar 2. Jumlah PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2017–2021

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk ini diikuti dengan adanya tren kenaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok selama periode 2017 sampai dengan 2021 dengan laju pertumbuhan. Walaupun pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan di tahun 2020, PDRB kembali pulih di tahun 2021 dan mengalami peningkatan tahunan sebesar 3,76%. Tiga subsektor yaitu industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil masing-masing memberikan kontribusi 29,1%, 21,87%, dan 20,64% terhadap PDRB Kota Depok pada 2021.

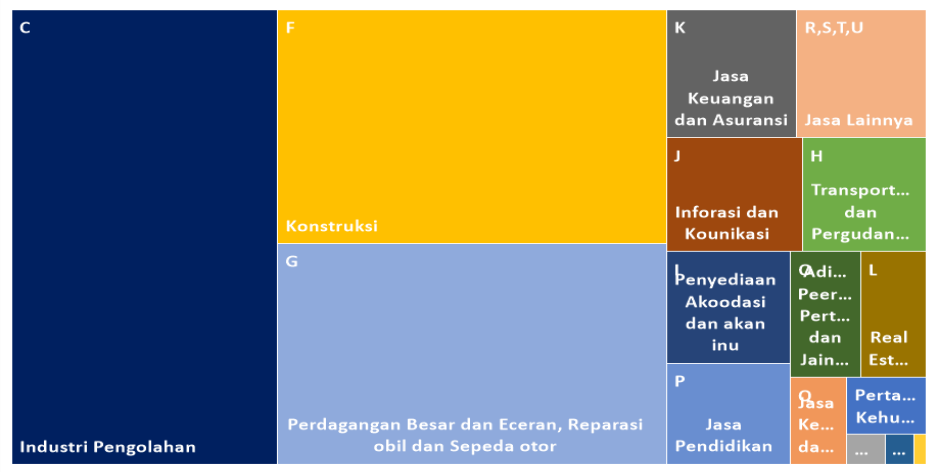

Sumber: Diolah dari BPS Kota Depok (2024)
Gambar 3. Distribusi PDRB Kota Depok Tahun 2021

PDRB merupakan salah satu indikator utama dalam pemerintahan daerah untuk menentukan potensi pajak suatu wilayah. Peningkatan PDRB cenderung berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak daerah (Rosyadi, 2024). Penelitian Mongdong (2018) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 0,197% dengan setiap kenaikan PDRB sebesar 1%. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Aji (2021), Putra dkk. (2020), dan Saputra (2018) yang secara konsisten menunjukkan bahwa PDRB meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Oleh karena itu, menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk memanfaatkan PDRB sebagai indikator dalam mengidentifikasi basis struktur ekonomi daerah guna menggali potensi pajak yang ada. Untuk memahami sektor unggulan di wilayah Kota Depok, Metode analisis *Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ)*, dan *Shift Share* adalah pendekatan yang relevan dalam mengidentifikasi sektor-sektor unggulan suatu daerah. Melalui pendekatan tersebut pembuat kebijakan dapat melihat sektor yang menjadi basis, non-basis dalam perekonomian dan dapat melihat pergeseran sektoral dari perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu (Pribadi & Yanuar, 2021). Hal ini juga senada oleh Purwadina dkk. (2021) yang menyatakan pengukuran LQ, DLQ, merupakan analisis yang umum digunakan untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah. Serta penelitian Basuki & Mujiraharjo, (2017), yang menjelaskan analisis *shift share* merupakan teknik analisis yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional atau daerah setingkat di atasnya

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan analisis LQ, DLQ, dan *Shift Share* dalam konteks Kota Depok. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan serta menganalisis interaksi dan integrasi wilayah dalam upaya optimalisasi potensi pajak di Kota Depok.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Regional

Ekonomi regional, juga disebut sebagai ekonomi wilayah, adalah bidang studi ekonomi yang mempelajari bagaimana wilayah tertentu memiliki potensi sumber daya yang berbeda (Tarigan, 2005). Studi ini berfokus pada analisis pertumbuhan dan pengembangan beberapa sektor ekonomi tertentu di suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kekuatan dan karakteristik lokal yang unik. Tujuan utama dari kajian ekonomi regional adalah untuk menemukan sektor-sektor ekonomi yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan dapat digunakan untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien dengan mengidentifikasi sektor unggulan. Mereka juga dapat membuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Potensi untuk menerima sektor unggulan ini juga sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah melalui pengelolaan APBD yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ekonomi regional dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan potensi wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi makro yang paling penting adalah produk domestik bruto (PDB), yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara selama periode waktu tertentu. Nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama jangka waktu tertentu disebut PDB, menurut Mankiw (2003). PDRB yang merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di daerah tertentu, atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di daerah tersebut, adalah indikator serupa yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi regional.

Menurut BPS (2020) menyatakan bahwa PDRB menggambarkan komposisi nilai tambah yang dirinci berdasarkan sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan bagaimana nilai tambah tersebut digunakan. PDRB dari lapangan usaha dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas produksi di setiap lapangan usaha. Besar PDRB pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi melalui data dari berbagai sektor lapangan usaha

PDRB dapat dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) atau harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu tanpa pengaruh inflasi. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai output berdasarkan harga aktual pada periode tertentu.

Teori Sektor Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama ditentukan oleh permintaan terhadap barang dan jasa dari luar wilayah tersebut (Gusrizal, 2022). Pribadi & Nurbiyanto (2021) menjelaskan bahwa suatu sektor dikategorikan sebagai sektor basis ekonomi jika sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan internal daerah sekaligus menghasilkan produk yang dapat diekspor ke luar wilayah. Sebaliknya, sektor non-basis hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam wilayah tersebut.

Kontribusi sektor basis terhadap perekonomian menjadikannya sebagai sektor unggulan, karena perannya sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan daerah. Ridwan (2016) menegaskan bahwa semakin besar ekspor atau suplai ekonomi dari suatu daerah ke wilayah lain, semakin maju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Lebih lanjut, menurut Soepono (2001), analisis basis ekonomi regional dapat digunakan untuk menilai aktivitas ekspor daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi serta memahami pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, sektor basis memiliki peranan strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Metode Pengukuran Sektor Basis

Metode pengukuran dalam teori basis ekonomi bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang berperan sebagai penggerak utama ekonomi suatu wilayah. Beberapa metode yang sering digunakan dalam analisis teori basis ekonomi meliputi:

a. Analisis *LQ*

Kontribusi relatif sektor ekonomi tertentu dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah referensi, seperti tingkat provinsi atau nasional, dapat dihitung menggunakan LQ. Untuk menentukan sektor basis ekonomi masyarakat suatu daerah, analisis ini mengacu pada karakteristik *output*, nilai tambah, atau kesempatan kerja (Muljarijadi, 2017). Data PDRB umumnya digunakan dalam menghitung LQ karena dapat membandingkan kontribusi nilai tambah sektor ekonomi daerah terhadap sektor ekonomi yang sama pada tingkat yang lebih luas, seperti provinsi atau nasional.

b. Analisis *DLQ*

Dynamic DLQ adalah evolusi dari LQ yang menggunakan faktor waktu untuk mengukur dinamika pertumbuhan sektor ekonomi. DLQ membandingkan laju pertumbuhan sektor tertentu pada tingkat provinsi dengan laju pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat nasional (Kuncoro, 2012). Sektor-sektor yang memiliki peran penting saat ini dan berpotensi menjadi basis di masa depan dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode ini.

c. Analisis *Shift Share*

Shift Share berguna untuk mengidentifikasi perubahan dan pergeseran kontribusi suatu industri atau sektor ekonomi dalam ekonomi suatu wilayah. Ini dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan industri suatu wilayah dengan wilayah referensi, seperti tingkat nasional, untuk mengukur pengaruh faktor nasional, struktur industri lokal, dan daya saing regional terhadap pertumbuhan industri tersebut (Salakory & Matulessy, 2020).

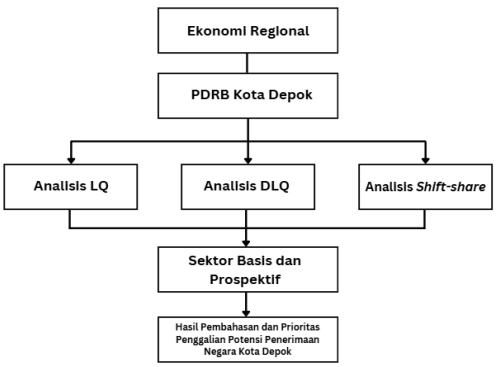

Sumber: Diolah penulis
Gambar 4. Kerangka Teori

METODE PENELITIAN

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan sumber resmi dari BPS. PDRB Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan sektor usaha, digunakan dengan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama lima tahun, dari 2017 hingga 2021. Diharapkan data ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan ekonomi regional di seluruh Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok selama periode tersebut.

a. Analisis LQ

Umumnya, metode *LQ* menggunakan formula sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Sib/Sb}{Sia/Sa}$$

Keterangan:

Sib =PDRB sektor i pada Kota Depok

Sb =Total PDRB Kota Depok

Sia =PDRB sektor i di Provinsi Jawa Barat

Sa =Total PDRB di Provinsi Jawa Barat

Sektor tertentu berkembang lebih cepat di kabupaten atau wilayah tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi atau wilayah acuan. Ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan nilai LQ lebih dari 1. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor tersebut berfungsi sebagai sektor basis ekonomi kabupaten dan memiliki potensi untuk mengekspor. Sebaliknya, jika nilai LQ kurang dari 1, hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut berkembang lebih lambat dibandingkan dengan sektor serupa di tingkat provinsi, yang menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor non-basis ekonomi di kabupaten.

b. Analisis DLQ

Metode DLQ menggunakan formula sebagai berikut:

$$DLQ = \left(\frac{(1+gik)/(1+gk)}{(1+gtp)/(1+gp)}\right)^t$$

Keterangan:

DLQ = Indeks tingkat pertumbuhan sektor i di Kota Depok
gik = tingkat pertumbuhan rata-rata PDRB sektor ekonomi i di Kota Depok
gk = tingkat pertumbuhan rata-rata total PDRB di Kota Depok
gtp = tingkat pertumbuhan rata-rata PDRB sektor ekonomi i Provinsi Jawa Barat
gp = tingkat pertumbuhan rata-rata total PDRB Provinsi Jawa Barat
t = tingkat pertumbuhan rata-rata DLQ

Jika nilai DLQ > 1, daerah tersebut memiliki potensi untuk berkembang atau berpotensi menjadi sektor basis ekonomi. Sebaliknya, jika nilai DLQ < 1, daerah tersebut kurang prospektif untuk menjadi basis ekonomi.

c. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* mengacu pada analisis perubahan metrik kegiatan ekonomi, seperti produksi, pada dua titik waktu yang berbeda di seluruh negara. Pertumbuhan nasional (PN), pertumbuhan proporsional (PP), dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) adalah tiga bagian dari pendekatan ini.

Metode *shift share* menggunakan formula sebagai berikut :

1. Rasio Indikator Kegiatan Ekonomi

   Metode ini digunakan untuk membandingkan tingkat produksi di sektor ekonomi tertentu dalam suatu wilayah. Rasio yang digunakan dalam analisis ini meliputi ri (rasio produksi sektor tertentu di wilayah tersebut), Ri (rasio total produksi di wilayah tersebut), dan Ra (rasio total di wilayah acuan).

   Rumus Ri

$$Ri = \frac{X'i - Xi}{Xi}$$

   Keterangan:
   X'i. = Produksi Provinsi Jawa Barat di sektor i pada tahun akhir analisis
   Xi. = Produksi Provinsi Jawa Barat di sektor i pada tahun dasar analisis

   Rumus Ra

$$Ra = \frac{X'.. - X..}{X..}$$

   Keterangan:
   X'.. = Produksi total pada tahun akhir analisis
   X.. = Produksi kerja total pada tahun dasar analisis

2. Komponen Pertumbuhan Wilayah

   Ini terdiri dari komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW)

   Rumus PN

$$PNij = (Ra)Yij$$

   Keterangan:
   PNij = Komponen pertumbuhan nasional sektor i untuk Kota Depok
   Yij = Produksi kerja dari sektor i pada Kota Depok pada tahun dasar analisis
   Ra = Rasio produksi Provinsi Jawa Barat

Rumus PP

$$PPij = (Ri-Ra)Yij$$

Keterangan:
PPij =komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk Kota Depok
Yij =produksi dari sektor i pada wilayah Kota Depok pada tahun dasar analisis
Ri =rasio produksi Provinsi Jawa Barat dari sektor i
Ra =rasio produksi Provinsi Jawa Barat

PPij < 0, artinya sektor i pada wilayah j pertumbuhannya lambat
PPij > 0, artinya sektor i pada wilayah j pertumbuhannya cepat

Rumus PPW

$$PPWij = (ri-Ri)Yij$$

Keterangan:
PPWij = komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk Kota Depok

Yij = produksi dari sektor i pada Kota Depok pada tahun dasar analisis
ri = rasio produksi kerja sektor i pada Kota Depok
Ri = rasio produksi kerja Provinsi Jawa Barat dari sektor i

Nilai PPWij < 0 menunjukkan bahwa sektor i di Kota Depok relatif tidak memiliki daya saing jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, nilai PPWij > 0 mengindikasikan bahwa sektor i di Kota Depok memiliki daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor serupa di wilayah pembanding.

Rumus persentase ketiga pertumbuhan wilayah

%PNij = Ra × 100%
%PPij = (Ri-Ra) × 100%
%PPWij = (ri-Ri) ×100%

3. Pergeseran Bersih (PB)

Pergeseran bersih berfungsi untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu sektor perekonomian.

$$PBij = PPij + PPWij$$

Keterangan:
PBij =Pergeseran bersih sektor i untuk Kota Depok
PPij = Pertumbuhan proporsional sektor i untuk Kota Depok
PPWij = Pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk Kota Depok
PBij < 0, pertumbuhan sektor i Kota Depok termasuk lamban
PBij > 0, pertumbuhan sektor i Kota Depok termasuk progresif (maju)

Rumus ri

$$ri = \frac{X'ij - Xij}{Xij}$$

Keterangan:
Xij = Produksi dari sektor i pada Kota Depok pada tahun dasar analisis
Xij = Produksi dari sektor i pada Kota Depok pada tahun akhir analisis

4. Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor ekonomi di suatu wilayah selama periode tertentu, dengan memanfaatkan nilai %ΔPPij dan %ΔPPWij. Analisis dilakukan menggunakan empat kuadran, di mana PP diletakkan pada sumbu horizontal sebagai absis, dan PPW pada sumbu vertikal sebagai ordinat. Sebuah garis miring dengan sudut 45 derajat memotong kuadran II dan IV, membagi sektor-sektor ke dalam dua kategori utama. Sektor yang progresif atau maju berada di atas garis tersebut, sementara sektor yang pertumbuhannya lambat berada di bawah garis.

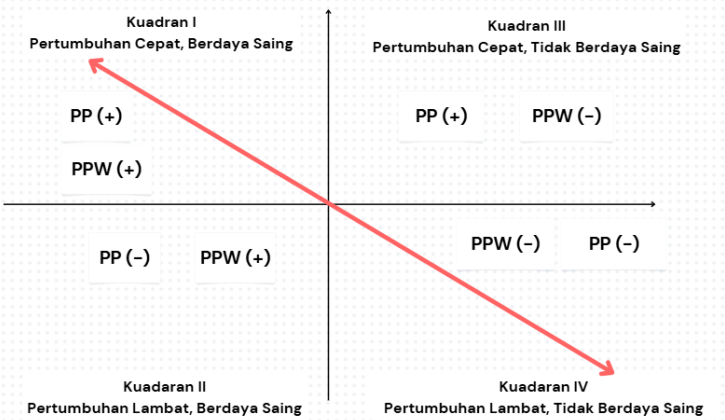

Sumber: Diolah dari Pribadi & Yanuar (2021)
Gambar 5 Kuadran Shift Share

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis LQ dan DLQ Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Data PDRB Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat yang sudah dikompilasi, kemudian dianalisis menggunakan perhitungan rumus LQ dan DLQ. Berdasarkan perhitungan LQ, didapatkan informasi berupa pengkategorian sektor ekonomi di Kota Depok terkait sektor basis dan nonbasis ekonomi. Kemudian, setelah data PDRB Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat telah dikompilasi, perhitungan rumus LQ dan DLQ digunakan. Perhitungan LQ menghasilkan pembagian sektor ekonomi Kota Depok menjadi sektor basis dan nonbasis.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki 9 sektor ekonomi yang merupakan basis, 7 sektor yang bukan basis, dan 1 sektor yang tidak memiliki nilai PDRB karena tidak ada di Kota Depok, yaitu Pertambangan dan Penggalian. Sektor-sektor ini termasuk konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makanan, jasa keuangan dan asuransi, properti, dan administrasi.

Sektor konstruksi di Kota Depok menempati kategori basis ekonomi dengan nilai rata-rata LQ tertinggi sebesar 2,544. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan sektor konstruksi di Kota Depok lebih pesat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Barat, sekaligus menunjukkan adanya potensi ekspor. Di sisi lain, beberapa sektor yang masuk dalam kategori non-basis ekonomi meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; serta jasa bisnis.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada kategori non-basis ekonomi memiliki nilai rata-rata LQ terkecil, yaitu 0,157. Pertumbuhan sektor ini di Kota Depok lebih lambat daripada di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya disebabkan oleh terus menurunnya luas lahan sawah setiap tahun (Soeharly, 2024).

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rata-Rata LQ Kota Depok dan Jawa Barat Tahun 2017- 2021

Kategori	Sektor Menurut Lapangan Usaha	Rata-Rata LQ	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,157	Bukan Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0	-
C	Industri Pengolahan	0,694	Bukan Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,727	Bukan Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,931	Bukan Basis
F	Konstruksi	2,544	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,397	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,742	Bukan Basis

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,288	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,629	Bukan Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,555	Basis
L	Real Estate	1,385	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,502	Bukan Basis
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,242	Basis
P	Jasa Pendidikan	1,005	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,402	Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,873	Basis

Sumber: Diolah penulis

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan DLQ, ditemukan informasi berupa pengkategorian prospektif dan tidak prospektif pada sektor ekonomi di Kota Depok. Hasil perhitungan ditemukan bahwa Kota Depok memiliki 7 sektor ekonomi yang bersifat prospektif, 9 sektor bersifat tidak prospektif, dan 1 sektor yang tidak memiliki nilai PDRB karena sektor tersebut tidak ada di Kota Depok, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian.

Pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makanan; jasa keuangan dan asuransi; dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib adalah beberapa sektor yang bersifat prospektif. Nilai DLQ tertinggi untuk sektor ini adalah 27,736.

Namun, sektor yang tidak prospektif termasuk industri pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; informasi dan komunikasi; properti; jasa perusahaan; pendidikan; kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Nilai DLQ terendah di sektor jenis perusahaan adalah 0,062, menunjukkan bahwa sektor ini tidak prospektif.

Tabel 2. Hasil Perhitungan DLQ Kota Depok dan Jawa Barat Tahun 2017- 2021

Kategori	**DLQ**	**Keterangan**
A	0,264	Tidak Prospektif
B	-	-
C	0,307	Tidak Prospektif
D	27,736	Prospektif
E	0,426	Tidak Prospektif
F	2,270	Prospektif
G	2,084	Prospektif
H	1,926	Prospektif

I	1,665	Prospektif
J	0,364	Tidak Prospektif
K	1,224	Prospektif
L	0,281	Tidak Prospektif
M,N	0,062	Tidak Prospektif
O	234,741	Prospektif
P	0,809	Tidak Prospektif
Q	0,551	Tidak Prospektif
R,S,T,U	0,827	Tidak Prospektif

Sumber: Diolah penulis

4.2 Analisis Sektor Basis Ekonomi Kota Depok

Setelah menghitung nilai LQ dan DLQ, sektor-sektor basis atau unggulan di Kota Depok dapat diidentifikasi dengan mengkombinasikan kedua nilai tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.3. Berdasarkan hasil penghitungan, sektor-sektor tersebut diklasifikasikan menjadi sektor prospektif dan tidak prospektif. Sektor prospektif menunjukkan potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Sektor basis maupun non-basis yang bersifat prospektif dapat dijadikan fokus pengembangan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Tabel 3. Analisis LQ dan DLQ Kota Depok Tahun 2017-2021

Kategori	LQ	DLQ	Keterangan Akhir
A	0,157	0,264	Bukan Basis Tidak Prospektif
B	-	-	-
C	0,694	0,307	Bukan Basis Tidak Prospektif
D	0,727	27,736	Bukan Basis Prospektif
E	0,931	0,426	Bukan Basis Tidak Prospektif
F	2,544	2,270	Basis Prospektif
G	1,397	2,084	Basis Prospektif
H	0,742	1,926	Bukan Basis Prospektif
I	1,288	1,665	Basis Prospektif
J	0,629	0,364	Bukan Basis Tidak Prospektif
K	1,555	1,224	Basis Prospektif
L	1,385	0,281	Basis Tidak Prospektif
M,N	0,502	0,062	Bukan Basis Tidak Prospektif
O	1,242	234,741	Basis Prospektif
P	1,005	0,809	Basis Tidak Prospektif
Q	1,402	0,551	Basis Tidak Prospektif
R,S,T,U	1,873	0,827	Basis Tidak Prospektif

Sumber: Diolah penulis

Menurut gabungan nilai LQ dan DLQ, proyeksi ekonomi dibagi menjadi empat kuadran. Sektor unggulan, yang merupakan sektor inti yang memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan, termasuk dalam Kuadran I. Beberapa bagian dari kuadran ini termasuk konstruksi; perdagangan besar dan toko reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makanan; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Karena kontribusi dan potensi pertumbuhannya yang besar terhadap perekonomian, sektor-sektor ini harus dikembangkan lebih lanjut.

Sektor konstruksi menempati posisi teratas berdasarkan hasil perhitungan nilai LQ dan DLQ di Kota Depok. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.254.513 jiwa, meningkat menjadi 2.330.333 jiwa pada tahun 2018, 2.406.826 jiwa pada tahun 2019, dan 2.484.186 jiwa pada tahun 2020.

Perkembangan populasi tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan industri konstruksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan penyediaan akomodasi dan makanan. Selain itu, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, menjadi semakin penting untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yang terus meningkat.

Sektor ekonomi yang berada di kuadran II merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tinggi, meskipun belum menjadi sektor basis ekonomi. Di Kota Depok, sektor seperti Pengadaan Listrik dan Gas serta Transportasi dan Pergudangan termasuk dalam kategori ini. Meskipun belum menjadi sektor basis, sektor-sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, terutama di kawasan Jabodetabek, termasuk Kota Depok, sehingga layak untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sebaliknya, sektor-sektor yang berada di kuadran III dan kuadran IV memiliki laju pertumbuhan yang rendah, sehingga tidak menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Depok dalam upaya pengembangan potensi ekonomi di sektor-sektor tersebut.

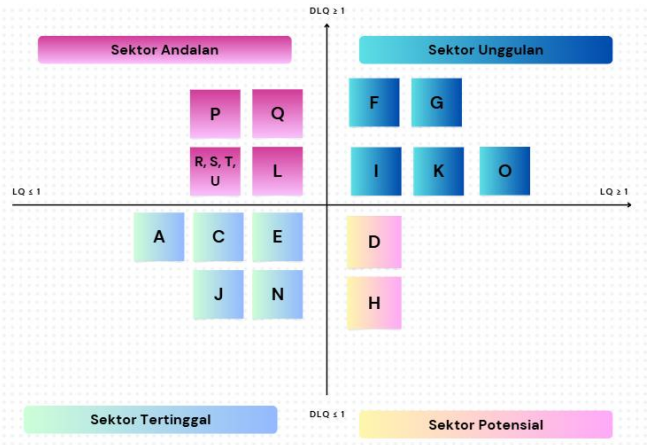

Sumber: Diolah penulis

Gambar 6. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kota Depok

Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian di tingkat lebih tinggi. Dalam analisis ini, pertumbuhan sektoral di kabupaten dengan sektor yang

sama di tingkat provinsi akan dilihat. Terdapat tiga komponen dalam analisis pergeseran persentase: pengaruh pertumbuhan nasional, pengaruh bauran industri dan pergeseran diferensial.

Tabel 4. Ringkasan Analisis *Shift Share* Kota Depok

Analisis *Shift Share* Kota Depok		
National Share (PNij)	5.248.756.641.544	75,35%
Industrial Mix Share (PPij)	61.159.597.552	0,88%
Different Local Share (PPWij)	1.656.036.530.904	23,77%
Perubahan PDRB (ΣΔ PDRB)		**6.965.952.770.000**

Sumber: Diolah penulis

Dari data tabel 4 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan mampu memberikan pengaruh sebesar Rp5,2 triliun atau sebesar 75,35% terhadap peningkatan PDRB Kota Depok.

Tabel 5. Analisis *Shift Share* Kota Depok

Kategori	***National Share* (PNij)**		***Industrial Mix Share (*PPij)**		***Different Local Share* (PPWij)**		***Net Shift* (PBij)**	
	Jumlah	**%**	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**
A	62.423.604.055	12,21	-17.612.687.470	-3,45	-8.183.356.585	-1,60	-25.796.044.055	-5,05
B	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C	1.623.018.199.354	12,21	-245.361.317.689	-1,85	-135.744.991.666	-1,02	-381.106.309.354	-2,87
D	14.564.575.655	12,21	-12.262.841.175	-10,28	16.623.235.520	13,94	4.360.394.345	3,66
E	3.959.448.364	12,21	6.209.136.138	19,15	-49.684.502	-0,15	6.159.451.636	19,00
F	1.067.930.071.868	12,21	174.251.753.541	1,99	934.269.374.591	10,68	1.108.521.128.132	12,68
G	1.125.170.795.746	12,21	-533.795.783.394	-5,79	506.169.677.648	5,49	-27.626.105.746	-0,30
H	186.779.208.358	12,21	-98.166.371.928	-6,42	74.620.373.570	4,88	-23.545.998.358	-1,54
I	175.680.155.810	12,21	-39.688.395.108	-2,76	87.027.419.297	6,05	47.339.024.190	3,29
J	135.254.388.200	12,21	658.399.693.706	59,44	-37.380.691.906	-3,37	621.019.001.800	56,07
K	204.454.452.667	12,21	32.355.403.828	1,93	93.751.253.505	5,60	126.106.657.333	7,53
L	91.009.211.421	12,21	183.029.776.721	24,56	-35.571.048.142	-4,77	147.458.728.579	19,79
M,N	12.132.355.108	12,21	-7.097.464.165	-7,14	-2.774.100.943	-2,79	-9.871.565.108	-9,94
O	127.235.267.391	12,21	-156.446.140.300	-15,02	58.272.512.909	5,59	-98.173.627.391	-9,42
P	148.989.630.098	12,21	78.811.637.490	6,46	49.947.992.412	4,09	128.759.629.902	10,55
Q	58.974.035.569	12,21	38.597.733.940	7,99	8.992.350.491	1,86	47.590.084.431	9,85

R,S,T, U	211.181.241.880	12,21	-64.536.585	-0,004	46.066.214.705	2,66	46.001.678.120	2,66
PDRB	5.248.756.641.544		61.159.597.552		1.656.036.530.904		1.717.196.128.456	

Sumber: Diolah penulis

Selanjutnya, dilihat dari komponen *Industrial Mix Share (PPij)* secara keseluruhan bernilai positif atau lebih besar dari nol (>0) hal ini menandakan secara keseluruhan laju pertumbuhan memiliki pertumbuhan yang cepat. Namun, terdapat hal yang menarik adalah industri pengolahan yang menyumbang nilai *national share* tertinggi justru memiliki laju pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar 1,85%. Di sisi lain, laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 59,44% dalam periode waktu 2017–2021. Hal ini sejalan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas.

Komponen terakhir analisis *shift share* Kota Depok adalah Different Local Share (PPWij). Secara agregat Kota Depok memiliki daya saing yang tinggi hal ini ditunjukkan dengan hasil penghitungan PPWij secara keseluruhan meningkat sebesar Rp1,6 triliun dalam periode waktu 2017–2021. Daya saing tertinggi terdapat pada sektor konstruksi, sejalan dengan analisis LQ dan DLQ sebelumnya yang mengklasifikasikan sektor ini sebagai sektor unggulan.

Pergeseran bersih (PB) atau *Net Shift* Kota Depok diperoleh dengan menjumlahkan nilai *Industrial Mix Share (PPij)* dan *Different Local Share (PPWij)*. Hasil perhitungan menunjukkan nilai PB Kota Depok secara agregat memiliki nilai positif (>0) yang artinya memiliki pertumbuhan yang bersifat progresif, namun terdapat beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan yang bersifat lambat atau memiliki nilai negatif (<0) seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa perusahaan; serta administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

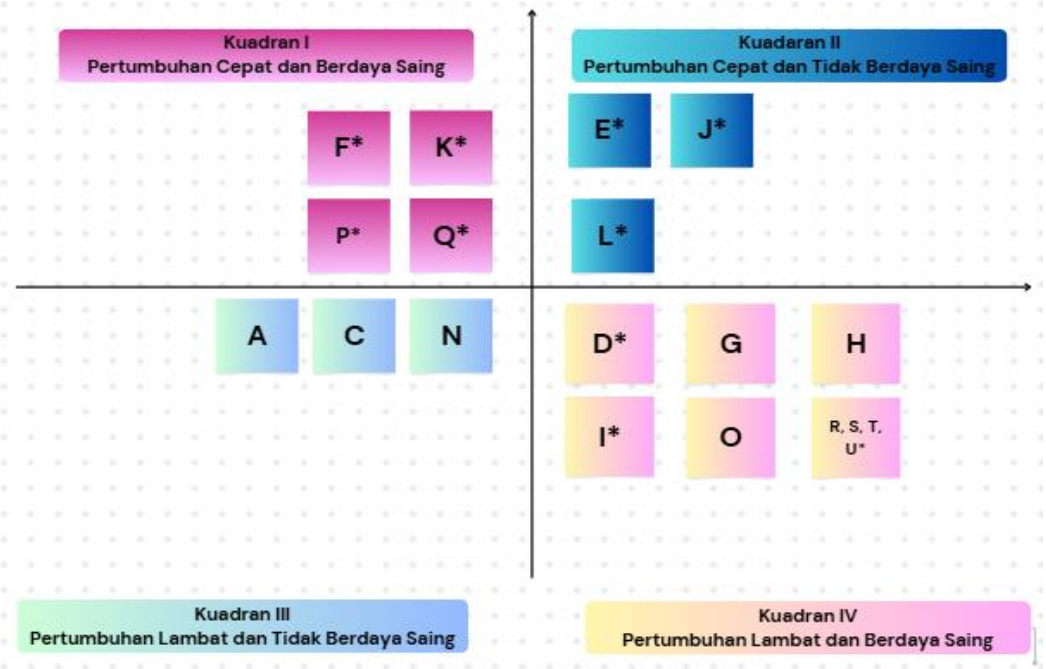

**Sektor memiliki pertumbuhan progresif*
Sumber: Diolah penulis
Gambar 7 Kuadran Analisis *Shift Share*

Analisis Potensi Pajak Sektor Unggulan

Untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak daerah di Kota Depok, pemerintah perlu menerapkan strategi berbasis data yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui analisis LQ, DLQ, dan *Shift Share*. Hasil irisan dari kuadran 1 pada analisis LQ dan DLQ, yang menunjukkan sektor unggulan, serta kuadran 1 pada Shift Share Analysis, yang mencerminkan sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi, menempatkan sektor konstruksi dan sektor jasa keuangan sebagai prioritas utama. Kedua sektor ini memiliki pertumbuhan progresif dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Depok, menjadikannya pilihan strategis untuk dioptimalkan sebagai sumber utama pendapatan pajak daerah.

Sektor konstruksi, misalnya, berpotensi besar dalam mendukung penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan meningkatnya proyek pembangunan perumahan, infrastruktur, dan properti komersial, sektor ini terus memperluas basis pajak melalui transaksi dan kepemilikan aset yang semakin bertambah. Berdasarkan data dari BPS Kota Depok (2023), kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal menunjukkan tren positif yang konsisten selama lima tahun terakhir.

Di sisi lain, sektor jasa keuangan juga memiliki peluang optimal untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Aktivitas perbankan, asuransi, dan investasi di wilayah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga membuka potensi penerimaan pajak melalui Pajak Reklame, terutama untuk promosi layanan keuangan. Selain itu, penggunaan energi listrik dalam skala besar oleh sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Tren pertumbuhan sektor jasa keuangan di Depok bahkan menunjukkan peningkatan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang kompetitif (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Selain kedua sektor tersebut, Pemerintah Kota Depok juga dapat mempertimbangkan potensi dari sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini merupakan sektor basis yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota. Tingginya permintaan barang dan jasa seiring dengan pertumbuhan penduduk menjadikan sektor ini relevan untuk digali lebih lanjut (BPS Kota Depok, 2023). Di samping itu, sektor pengadaan listrik dan gas yang menunjukkan pertumbuhan progresif dapat menjadi andalan melalui optimalisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), mengingat tingginya kebutuhan energi di kota yang terus berkembang ini. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan juga memiliki peluang yang menjanjikan, terutama dari pajak kendaraan bermotor komersial, pajak reklame, dan pajak parkir, yang terus bertumbuh seiring meningkatnya aktivitas logistik (Kementerian Keuangan, 2023)

Untuk mendukung optimalisasi ini, pemerintah harus memperkuat sistem pendataan berbasis digital guna memastikan akurasi data objek dan wajib pajak, terutama pada sektor-sektor prioritas. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah. Di sisi lain, pemberian insentif fiskal bagi sektor-sektor unggulan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis pajak daerah. Dengan strategi yang terintegrasi dan berbasis pada hasil analisis LQ, DLQ, dan Shift Share, Kota Depok dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor unggulan, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, terdapat sektor yang tidak menjadi prioritas Kota Depok, yaitu (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) industri pengolahan; serta (3) jasa perusahaan. Sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial juga tidak menjadi fokus karena sifatnya yang sulit untuk dipajaki akibat banyaknya insentif dan pengecualian pajak, baik untuk PPh maupun PPN mengingat sektor ini memiliki manfaat sosial yang besar (Kleem, 2009).

KESIMPULAN

Hasil analisis LQ dan DLQ menunjukkan bahwa beberapa sektor utama di Kota Depok adalah (1) konstruksi; (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (3) penyediaan akomodasi dan makanan; dan (4) jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu, sektor yang relatif lebih tertinggal dibandingkan lainnya ialah pertanian, kehutanan, dan jaminan sosial wajib.

Selanjutnya, berdasarkan metode perhitungan Shift Share, industri pengolahan Kota Depok unggul dalam hasil analisis National Share (PNij), tetapi dalam hasil analisis *Industrial Mix Share* (PPij), industri informasi dan komunikasi memiliki nilai tertinggi. Berbeda dengan hasil analisis *Different Local Share* (PPWij), konstruksi memiliki daya saing tertinggi. Selain itu, *Net Shift* Kota Depok memiliki nilai kumulatif positif (>0), yang menunjukkan bahwa pertumbuhannya terus meningkat.

Untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak di Kota Depok, pemerintah dapat memanfaatkan hasil analisis LQ, DLQ, dan *Shift Share*. Dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang berada pada kuadran 1 dalam analisis LQ dan DLQ sebagai sektor unggulan, serta sektor-sektor pada kuadran 1 dalam analisis *Shift Share* sebagai sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi, pemerintah dapat menetapkan sektor konstruksi dan jasa keuangan sebagai prioritas utama.

Kedua sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang progresif serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, sehingga menjadi pilihan strategis untuk dioptimalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah di Kota Depok.

SARAN

1. Tulisan ini hanya mencakup periode tahun 2017 sampai dengan 2021 karena data rinci dan final dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya tersedia sampai tahun 2021. Sementara itu, data untuk tahun 2022 dan 2023 masih bersifat sementara dan belum final. Oleh karena itu, penting bagi peneliti selanjutnya untuk mencari data tahun terbaru yang telah diperbaiki dan bersifat final.
2. Analisis LQ, DLQ, dan *Shift Share* tidak secara menyeluruh menjelaskan fenomena di balik angka-angka yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis deskriptif yang lebih mendalam untuk memahami fenomena yang mendasari angka-angka tersebut. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi yang lebih komprehensif dan kontekstual, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil analisis kuantitatif tersebut.
3. Disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam pada sub-sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan signifikan berdasarkan hasil LQ, DLQ, dan *Shift Share*. Analisis mendalam sektor unggulan dari hasil ketiga metode tersebut dapat menggunakan analisis *input-output* sehingga dapat mengetahui (1) Dampak keterkaitan sektor unggulan; (2) Dampak penyebaran sektor unggulan ;atau (3) Dampak *multiplier effect* sektor unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

A, Saputra. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Tahun 2022*.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2024). *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Depok*.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Pare-Pare Menurut Lapangan Usaha tahun 2015-2019*.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia 2019–2023* (Vol. 15). Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.

Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, *15*(1), 52-60.

Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotien. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, *15*(1), 52-60.

Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2018). *Model-model kuantitatif untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah: konsep dan aplikasi.* PT Penerbit IPB Press.

Fitria, A. O., Erlianti, Z., & Desmawan, D. (2022, April). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, *2*(2), 514-522.

Fretes, P. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan (LQ),Struktur Ekonomi (Shift Share), Dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi PapuA 2018. *Develop*, *1*(2).

Gusrizal. (2022). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Kepulauan Seribu. *Bappenas Working Papers*, *5*(3).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Optimalisasi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Kemenkeu*.

Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan daerah: bagaimana membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan?* Salemba Empat.

Mankiw, N. G. (2003). *Pengantar Ekonomi* (2nd ed.). Erlangga : Jakarta.

Mongdong, C., Masinambow, V., & Tumangkeng, S. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Infrastruktur terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *18*(5), 198-209.

Muljarijadi, B. (2017). *Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. UNPAD PRESS.

Nugroho, A. D. (2010). Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Pulau Jawa. *Agro Ekonomi*, *17*(1), 67-72.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan OJK 2022*.

Pemerintah Kota Depok. (2023). *Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022.* Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok. (2024). *Berita Daerah Kota Depok*.

Pribadi, Y., & Nurbiyanto. (2021.). Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient Dan Shift-Share Analysis. *Jurnal Kelitbangan*, *9*(3), 299-310.

Purwadinata, S., Pamungkas, B. D., & Herwansyah. (2021). Analisis Potensi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *9*(1), 1-9.

Putra, P., F, H., & S, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informas*, (17), 129–140

R. Jumiyanti, K. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, *1*(1), 29-43. https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.1 12

Ridwan. (2016). *Pembangunan Ekonomi Regional*.

Rosyadi, M. R. (2024). Determinan Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia. *JURNALKU*, *4*(2), 222-231.

Salakory, H. S. M., & Matulessy, F. S. (2020, Desember). Analisis Shift-Share terhadap Perekonomian Kota Sorong. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, *14*(4), 575-586. https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss4pp575-586

Schaffer, W. a. (2010). Regional models of income determination: simple economic-base theory. *In Economic Base Theory*, 42.

Soeharly, M. F. D. (2024, February 12). *Ternyata Sawah di Depok Sisa 40 Hektar : Setiap Tahun Produksi Beras 300 Ton dan Sayur 1345 Ton*. Radar Depok. Retrieved November 9, 2024, from https://www.radardepok.com/metropolis/94611847669/ternyata-sawah-di-depok-sisa-40-hektar-setiap-tahun-produksi-beras-300-ton-dan-sayur-1345-ton

Soepono, P. (2001). Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor) : Posisi Dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. *Journal of Indonesian Economy and Business*, *16*(1), 41-53.

Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.

Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara.